

**POTONGAN HARGA JUAL EMAS
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Toko Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HABIBURROHMAN

NPM : 1321030140

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**POTONGAN HARGA JUAL EMAS
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Toko Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HABIBURROHMAN

NPM : 1321030140

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Salah satu kegiatan sehari-hari yang paling sering ditemui adalah jual beli. Agar praktik jual beli dapat dikatakan benar yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak masuk dalam kategori batil, maka setidaknya praktik jual beli harus memenuhi beberapa unsur dan salah satu unsur yang paling penting adalah proses transaksi itu didasari dengan rasa kerelaan dan suka sama suka. Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah praktik potongan harga jual emas pula dapat dijelaskan bahwa praktik pemotongan harga emas pada saat penjualan kembali hanya ditentukan berdasarkan salah satu pihak saja yaitu pemilik toko, sedangkan pihak penjual hanya dapat menerima saja tanpa bisa menolak, walaupun penjual menolak dan ingin menjual emasnya di toko lain, maka hal yang akan ditanggung penjual ialah pemotongan harga tersebut lebih besar dan hal ini menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penjual. Oleh sebab itu dalam hal ini terindikasi/adanya unsur paksaan dan keterpaksaan. Karenanya, setiap transaksi yang didasari paksaan maka akan menghilangkan salah satu rukun atau syarat sahnya jual beli yaitu kerelaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat?. Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap praktik potongan harga jual emas di pasar Sekincau Kecamatan Sekincau adalah bahwa praktik potongan harga emas telah melalui tahapan-tahapan, setidaknya untuk terjadinya praktik pemotongan harga emas tersebut telah terjadi dua kali transaksi jual beli. Proses pemotongan harga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pembeli emas (masyarakat setempat) melakukan transaksi jual beli emas dengan pemilik toko emas dengan harga yang normal. Setelah transaksi itu terjadi dan setelah pembayaran uang serta penyerahan surat/nota maka perpindahan hak kepemilikan emas tersebut terjadi, yaitu dari pihak pemilik toko ke pihak pembeli emas (masyarakat). Dan karena satu dan lain hal, pemilik emas harus menjual kembali emas yang pernah dibeli kepada pemilik toko. Akan tetapi sebelum emas tersebut dijual kembali, maka pemilik toko akan menimbang kembali emas tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti berkurangnya berat emas pada saat pembelian (susut). Setelah emas tersebut telah ditimbang kembali dan diketahui secara jelas beratnya, barulah pemilik toko menentukan pemotongan harga. Dan praktik pemotongan harga jual di pasar Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat hukumnya adalah boleh dan sah. Dalam pernyataan ini penulis berargumen dengan beberapa alasan karena faktor naik dan turunnya harga emas dan perawatan emas.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habiburrohman
NIM : 1321030141
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Potongan Harga Jual Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 04 Desember 2020
Penulis,



Habiburrohman
NPM. 1321030140



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung/Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **HABIBURROHMAN**
NPM : 1321030140
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Potongan Harga Jual Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Potongan Harga Jual Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Emas di Pasar Sekincau Lampung)”**, disusun oleh **Habiburrohman NPM. 1321030140** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 22Desember2020**, pukul **09.000-11.00** WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui
Rektor Fakultas Syari'ah

Dr. Khairuddin Tahmid, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النِّسَاء: ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memeakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S
al-Nisâ’ (4): 29).¹*

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
(Bandung, Suara Agung, 2000), h. 84.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Amalus Sobar dan ibunda Robiah, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik-adik tercinta, Mila Karmila dan Alm. Najib Tri Saputra, terima kasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah *swt* selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Habiburrohman, lahir pada tanggal 5 Oktober 1995 di Bukit Kemuning. Terlahir dari pasangan Amalus Sobar dan Robiah, putra sulung dari 3 bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas Sekincau Lampung Barat (2000-2001).
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Sekincau Lampung Barat (2001-2007).
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat (2007-2010).
4. Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3 Pangkat Jayanti Tanggerang (2010-2013).
5. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan formal di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Potongan Harga Jual Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat)” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin M.S.I, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., Pembimbing Akademik I dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H., Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Muamalah C angkatan 2013.
8. Rekan-rekan KKN kelompok 180 di Desa Kamilin Kecamatan Pegelaran Utara Pringsewu.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 04
Desember 2020
Penulis,

Habiburrohman
NPM. 1321030141

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikansi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Hukum Islam	
a. Pengertian Hukum Islam	12
b. Sumber-Sumber Hukum Islam	13
c. Karakteristik Hukum Islam.....	15
d. Macam-Macam Hukum Islam	20
e. Tujuan Hukum Islam.....	22
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Jual Beli	24
b. Dasar Hukum Jual Beli	28
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
d. Macam-Macam Jual Beli.....	41
e. Jual Beli yang Dilarang	44
f. Etika Jual Beli	53
B. Tinjauan Pustaka	61

BAB III. HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 - 1. Profil dan Sejarah Singkat Desa Sekincau 63
 - 2. Letak Geografis Desa Sekincau 64
 - 3. Keadaan Demografis Desa Sekincau 65
- B. Praktik Potongan Harga Jual Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat 69

BAB IV. ANALISIS DATA

- A. Praktik Potongan Harga Jual Emas di Pasar Sekincau Lampung Barat 83
- B. Pandangan Hukum Islam Tentang Potongan Harga Jual Emas..... 85

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan 90
- B. Rekomendasi 92

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

➤ Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعِيمٌ : *nu‘īma*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلد	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئَةٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَالله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِالله *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam membahas skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud dari skripsi ini. Dan judul skripsi ini adalah “Potongan Harga Jual Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Emas Pasar Sekincau Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung di dalam judul tersebut, perlu penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Potongan ialah ada pengurangan tentang harga barang.¹ Harga ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.² Jual ialah tukar sesuatu dengan uang.³ Emas ialah logam mulia berwarna kuning yang ditempa dan dibentuk, biasanya dibuat perhiasan seperti cincin, kalung.⁴ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia yang dibebani hukum dan yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁵ Menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik berhubungan dengan perintah, larangan maupun

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 891.

² *Ibid*, h. 388.

³ *Ibid*, h. 477.

⁴ *Ibid*, h. 295.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 1

pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw*.¹

Berdasarkan penegasan judul di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana hukum praktik pemotongan harga jual emas ditinjau dari kaca mata hukum Islam atau fikih muamalat. Dan dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif, di masyarakat yang menjadi objek penelitian, agar timbulnya kejelasan mengenai pemotongan harga emas yang akan atau telah dijual ke toko emas.
2. Alasan subjektif, agar penulis mendapatkan gelar di fakultas Syari'ah. Dan sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 11.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan-kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut di antaranya juga meliputi jual beli.¹

Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.² Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah *swt* di dunia dan akhirat.³

Allah *swt* telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah *swt* yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Shalah Ash-Shawi dan Abdulah Al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 25.

² Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPPE, 2003), h. 3.

³ <http://zulkhulafair.blogspot.co.id>, Published: Januari 2013, diakses pada tanggal 17 April 2016.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S Al-Nisa' (4): (29)).¹

Agar praktik jual beli dapat dikatakan benar yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak masuk dalam kategori batil, maka setidaknya praktik jual beli harus memenuhi beberapa unsur yang antara lain adalah:

1. Suka sama suka (*'an tarâḍin*).
2. Tidak adanya paksaan (*ikhtiyâr*).
3. Tidak diperbolehkannya penipuan dan ketidakjelasan (*garar*).
4. Bernilai secara syarak.²

Pada hakikatnya substansi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponogoro, 2000), h. 65.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 152.

menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syarak dan telah disepakati. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³

Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah praktik potongan harga jual emas pula dapat dijelaskan bahwa praktik pemotongan harga emas pada saat penjualan kembali hanya ditentukan berdasarkan salah satu pihak saja yaitu pemilik toko, sedangkan pihak penjual hanya dapat menerima saja tanpa bisa menolak, walaupun penjual menolak dan ingin menjual emasnya di toko lain, maka hal yang akan ditanggung penjual ialah pemotongan harga tersebut lebih besar dan hal ini menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penjual. Oleh sebab itu dalam hal ini terindikasi adanya unsur paksaan dan keterpaksaan. Karenanya, setiap transaksi yang didasari paksaan maka akan menghilangkan salah satu rukun atau syarat sahnya jual beli yaitu kerelaan.

Berdasarkan pemaparan tentang permasalahan di atas, maka sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan jual beli emas dengan potongan harga. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui hukumnya, sehingga penulis mengangkat judul

³ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah*, No. 2, Vol. XII, 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Online) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/208>. (12 Oktober 2019), h. 2.

penelitian dengan judul “Potongan Harga Jual Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Emas Pasar Sekincau Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada potongan harga jual emas menurut perspektif hukum Islam (studi kasus di toko emas pasar Sekincau desa Sekincau kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan hukum Islam tentang potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

G. Signifikan Penelitian

Penelitian ini cukup signifikan untuk segera dilaksanakan karena sebagaimana diketahui bahwa praktik pemotongan harga emas pada saat penjualan kembali, sudah menjadi suatu budaya bahkan telah menjadi keharusan bagi pemilik toko. Selain itu permasalahan yang terjadi bahwa pemotongan harga emas pada saat penjualan kembali hanya berdasarkan salah satu pihak saja yaitu pemilik toko, sedangkan pihak penjual hanya menerima kadar atau persentase pemotongan harga tersebut. Dan dalam hal ini pula terindikasi adanya unsur paksaan dari pemilik toko atau keterpaksaan dari pihak penjual, sedangkan dalam kajian fikih muamalat dijelaskan bahwa setiap orang yang akan bertransaksi baik itu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya harus dilandasi dan berimplikasi pada kerelaan, keridhaan dan tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dan keterpaksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu topik ini layak diangkat dan dipublikasikan di hadapan publik, agar permasalahan ini tidak menjadi suatu perdebatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹ Dari segi datanya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminai.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai emas yang diperjualbelikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa:

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riser Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 1996), h. 81.

² Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 100.

³ Lexy J Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 205.

¹ Moh. Nazier, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.² Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan pemotongan harga jual emas.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).³ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual emas yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pembeli emas yang ditinjau dari hukum Islam.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada

² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*Sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²

5. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu potongan harga jual emas menurut perspektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan jual beli tersebut. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan jual beli sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.¹ Metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...*, h. 126.

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981), h. 36.

kesimpulan yang menggunakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berkenaan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda atau yang dapat memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang serta pembeli emas, yaitu berjumlah 14 orang terdiri dari 4 pedagang dan 10 pembeli.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang di kemukkan oleh Suharsimi Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil semua. Maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 15 orang, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

7. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan potongan harga jual emas, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari hasil wawancara pemilik toko dan penjual emas di Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan pemotongan harga jual emas di desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah *swt* dan Sunat Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah *swt* untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan *'amaliyyah*.¹

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah *swt* untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Alquran dan Hadis.²

¹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017), h. 24.

² *Ibid*.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi *saw*, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *'amaliyyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:²

1) Alquran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Alquran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad *saw* melalui Malaikat Jibril. Alquran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Alquran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak

¹ *Ibid.*

² *Ibid*, h. 24-25.

mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Alquran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2) Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah *saw*. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata Hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnat, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah *saw* yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) Ijmak

Kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama disebut ijmak. Ijmak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat dan *tabi'in*. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4) Qiyâs

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Alquran, Hadis dan ijmak ialah *qiyâs*. *Qiyâs* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Alquran ataupun Hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu

yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

c. Karakteristik Hukum Islam

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syariah itu sendiri yang bersumber dari Alquran dan Hadis nabi dari *al-Ra'yu*. Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep *tauḥîd* merupakan pondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan dengan Allah *swt*, hubungan dengan manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, takwa, adil dan bijaksana serta mendahulukan kewajiban dari pada hak dan kewenangan. Sehubungan dengan doktrin di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu:

1) Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at isi am hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan

umum. penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.¹

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, salah satu ciri hukum Islam adalah *takâmul* yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *uṣûl* dengan *furû'*, tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.²

2) Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur dan luwes), hukum Islam mengatur segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik pada bidang muamalat, ibadah, pidana dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.³

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli bahwa ayat hukum yang berhubungan

¹ H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Logos, 1997), h. 46.

² M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 105.

³ H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 47.

dengan jual beli seperti surat al-Baqarah ayat 275, surat al-Nisâ' ayat 29 dan surat al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S al-Baqarah (2): 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S al-Nisâ' (4): 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S al-Jumu‘ah (62): 9).

Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan di hari Jum’at. Kemudian Rasûl menjelaskan beberapa aspek jual beli yang *lâzim* berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

3) Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat *universal*. Ia meliputi seluruh alam tanpa tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang non Arab. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).¹

Hukum Islam memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam

¹ *Ibid*, h. 49.

gerakannya hukum Islam menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah *asâsiyyah*, yaitu *ijtihâd*. *Ijtiḥâd*lah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian. dari nilai-nilai asasinya.¹ Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut dapat dipahami lewat konstitusi Negara muslim pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar *jizyah*, yang. berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah *zimmî*, berarti orang non-muslim yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-orang non-muslim itu diberikan hak otonomi yudisial tertentu. Warga negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah swt wahyukan.

4) Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan lainnya.²

¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam...*, h. 108.

² H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 51.

Perintah shalat dalam Alquran senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah *swt* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S al-Baqarah (2): 43).

Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalat dengan Allah *swt* dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

5) Hukum Islam bersifat *Ta 'aqqulî* dan *Ta 'abbudî*.

Sebagaimana dipahami bahwa syariat Islam mencakup bidang muamalat dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta 'abbudî/ghair al-ma 'qûlah al-ma 'nâ* (irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dalam bidang ini, tidak ada pintu *ijtihâd* bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalat, di dalamnya terkadang nilai-nilai *ta 'aqqulî/ma 'aqûlah al-ma 'nâ* (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk ber*ijtihâd* guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat tersebut.¹

Dengan demikian hukum Islam yang bersifat irasional, aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik,

¹ *Ibid*, h. 52.

karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung didalamnya, bukan karena rasionalitasnya.

Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah *swt*, yang dilengkapi dengan dua kelebihan daripada makhluk lainnya yaitu akal (intelegensia) dari kalbu (hati nurani).

d. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah *swt*. Segala aturan Allah *swt* dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Alquran dilengkapi penjelasannya dalam Hadis Nabi *saw*. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:¹

1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan

¹ *Ibid*, h. 25.

yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2) Sunat

Sunat ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunat ialah salat yang dikerjakan sebelum/sesudah salat wajib, membaca salawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3) Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4) *Makrûh*

Makrûh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan *makrûh* ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya. Tujuan Sistem Hukum Islam Sumber hukum syariat Islam adalah Alquran dan Hadis.

e. Tujuan Hukum Islam

Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah *swt*, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:¹

1) Pemeliharaan Atas Keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2) Pemeliharaan Atas Akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya.

¹ *Ibid*, h. 26-27.

Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3) Pemeliharaan Atas Kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

4) Pemeliharaan Atas Jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

5) Pemeliharaan Atas Harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

6) Pemeliharaan Atas Agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah *bâligh*, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan berniaga, perdagangan atau jual beli. Untuk usaha tersebut dibutuhkan adanya timbal balik di antara penjual dan pembeli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹

Jual beli merupakan pelepasan hak milik dengan adanya ganti rugi seperti uang, barang, atau juga dengan

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

jasa, atau memindahkan hak kepemilikan demi mendapatkan imbalan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang pas).¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta di sini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yang memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.²

Jual beli dalam bahasa Arab artinya menjual, mengganti dan menukar.³ *Al-Bai'*, *al-Tijârah*, *al-Mubâdalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter.

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

¹ *Ibid.* h. 140

² Lina Oktasari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya*”. (Skripsi Program Studi Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 29

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer....*, h. 75

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata lain dari *al-Bai'* (jual beli) adalah *al-Tijârah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah *swt*:

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S Fâṭir (35): 29).

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut ulama Ḥanafiyah jual beli didefenisikan dengan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan cara tertentu”

- 2) Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmû'*:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

- 3) Menurut ulama Mâlikiyyah jual beli didefenisikan dengan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا.¹

Artinya: Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

Allah *swt* mensyariatkan jual beli yang bisa dijadikan peluang dan keluasan bagi hambanya. Karena

¹Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 5.

manusia mempunyai kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak pernah akan terputus atau berhenti selama manusia masih hidup. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan peran dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sosial atau hubungan antara manusia dengan manusia tidak satu hal pun yang lebih baik dari pertukaran di mana seseorang memberikan kepunyaannya kemudian dia memperoleh apa yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing masing orang.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tentang pengertian jual beli di atas dapat kita pahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak, pihak satu menerima benda dan pihak satunya lagi pun menerima benda yang sebagaimana sudah disepakati dalam perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syarak.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 68.

Barang dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarak. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi bagi, ada harta yang ada perumpamaanya (*misli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimmî*) dan yang lain lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syarak.

Jual beli menurut ulama Mâlikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *zât* (berbentuk), iberfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau bukan pula perak, bendannya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak

¹ *Ibid*, h. 69.

merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji adalah masalah hidup dan kehidupan, pastinya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan pedoman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jual beli sendiri sudah ada sejak zaman para Nabi. Sejak saat itu pula jual beli mejadi kebiasaan oleh masyarakat hingga kini.

Adapun jual beli disyariatkan dalam Islam berdasarkan Alquran, Hadis, dan Ijmak, yakni:

1) Alquran.

- a) Surat al-Nisâ' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S al-Nisâ' (4): 29).

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 69-70.

Melalui ayat ini Allah *swt* mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.¹

b) Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ... ﴿٢٧٥﴾

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S al-Baqarah (2): 275).

c) Surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ... ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S al-Baqarah (2): 198).

Ayat-ayat yang sudah disebutkan menjelaskan bahwasanya Allah *swt* memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi transaksi yang diperbolehkan itu harus sesuai dengan syariat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah *swt* yang

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 495.

tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275 seperti yang sudah dituliskan sebelumnya bahwasanya Allah *swt* memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, yang artinya didalam transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan adanya unsur riba. karena Allah *swt* sudah mengharamkannya yang berarti itu tidak sesuai ketentuan syariat. Dan Allah *swt* menyerukan kepada umat manusia untuk mencari ridha dan karunianya.

2) Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ).

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ Rasulullah *saw* pernah ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah *saw* menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik.¹

Dalam Hadis lain pula dijelaskan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).²

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah *saw* bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka” (HR. Ibnu Majah).

¹ Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Dar al-‘Ilmi: Surabaya, tt), h. 798.

² Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. II, No. 2185 (Saudi: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2009), h. 737.

Berdasarkan kedua Hadis di atas sudah bisa mewakili bahwasanya jual beli merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam bahkan dianjurkan asalkan dengan tetap mengikuti rukun dan syarat jual beli yang ditentukan dalam Islam.

3) Ijmak.

Para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya jual beli seseorang dapat dengan mudah memiliki suatu barang atau kebutuhan yang diperlukan orang lain.¹

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya jual beli itu hukumnya mubah, artinya jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasûlullah *saw*, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar dari jual beli, rukun dan syarat merupakan bagian yang sangat penting, karena jika tidak adanya rukun dan syarat di dalam jual beli maka jual

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 73.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), h. 46.

beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh sebab itu Islam mengatur hukum tentang rukun dan syarat jual beli, antara lain:

1) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, rukun jual beli hanya ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara kerelaan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Menurut mayoritas ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:¹

- a) *Bâ'î*' (penjual).
- b) *Musytarî* (pembeli).
- c) *Ṣighah* (ijab dan kabul).
- d) *Ma'qûd 'alaih* (objek benda atau barang).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan.²

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabulnya, Rasulullah *saw* bersabda:

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., h. 76.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 70.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).¹

“Dari Abi Hurairah *ra* dari Nabi Muhammad *saw* bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”.

2) Syarat Jual Beli.

Syarat syarat dalam jual beli merupakan unsur penting yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun itu sendiri dan harus diperhatikan dalam melaksanakan jual beli karena syarat-syarat ini akan menentukan sah atau tidaknya jual beli berdasarkan syarak. Beberapa syarat-syarat jual beli menurut syarak adalah:

a) Menurut Subjeknya

Menurut subjeknya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

(1) Berakal

Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah *swt* di dalam Surat al-Nisâ’ ayat 5 yang berbunyi:

¹ Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), h. 543.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S al-Nisâ’ (4): 5).

(2) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.¹

(3) *Bâligh*

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah *bâligh* atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, h. 140.

beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Andaikata anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.¹

(4) Tanpa adanya paksaan (kehendaknya sendiri).

Dimaksudkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan transaksi atau perbuatan jual beli dengan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain itu sendiri melakukan perbuatan jual beli atas kerelaan darinya tanpa adanya unsur paksaan. Jual beli yang mengandung unsur

¹ *Ibid.*

paksaan atau tanpa kerelaan dari salah satu pihak adalah tidak sah.

Adapun yang mendasari suatu transaksi jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan di dalam surat al-Nisâ' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S al-Nisâ' (4): 29).

b) Menurut Objeknya

Objek jual beli adalah barang, benda dan/atau apa apa yang akan menjadi objek dalam perjanjian jual beli. Objek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: suci atau bersih barangnya, memberi manfaat menurut syarak, milik pribadi orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan atau dikuasai.

(1) Suci atau Bersih Barangnya

Suci atau bersih barangnya adalah barang yang akan dijual belikan bukanlah benda yang najis atau bukan benda yang

diharamkan oleh syarak seperti anjing, babi, dan yang lainnya seperti yang ada di dalam sabda Rasulullah *saw*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹

“Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya ia dengar Rasulullah *saw* bersabda para tahun penaklukan Makkah ia sedang di Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah haramkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala-berhala”. Ada orang bertanya: “ya Rasulullah *saw* bagaimana lemak bangkai karena digunakan untuk melabur perahu-perahu dan diminyaki dengannya akan kulit-kulit, dan orang-orang gunakan buat penerangan?”, sabdanya: tidak boleh, yaitu haram. Kemudian di waktu itu ia bersabda: “Dilaknat oleh Allah *swt* akan Yahudi, karena sesungguhnya Allah *swt* haramkan atas mereka lemak bangkai bangkai itu, mereka hancurkan lemak tersebut, dan jual dan memakan uangnya”. (HR. Bukhari).

¹Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz III, No. 2236 (Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 2002), h. 84.

Dituliskan di dalam buku Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi yang berjudul Hukum Ekonomi Islam, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Ḥanafî dan mazhab Dâhirî mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.

Landasan hukum tentang hal ini, dapat dipedomi ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad *saw*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدَّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ
فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنِّهَا
مَيْتَةٌ. فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

“Dari Ibn ‘Abbâs berkata: Pada suatu hari Nabi Muhammad *saw* lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah bersabda: Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalau disamak dan dapat kalian manfaatkan? Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi bangkai.” Rasulullah menjawab: “sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya” (H.R. Muslim No. 542).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya barang-barang najis, arak, dan bangkai dapat diperjualbelikan

dengan ketentuan asalkan pemanfaatannya bukan untuk dikonsumsi atau bukan untuk bahan makanan.

(2) Memberi manfaat menurut syarak.

Memberi manfaat menurut syarak atau barang yang dapat dimanfaatkan mempunyai arti yang sangat relatif, karena pada hakikatnya barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti barang yang dapat dikonsumsi seperti makanan-makanan, dan banyak lagi barang-barang yang bermanfaat dijadikan objek jual beli.

Akan tetapi barang bermanfaat yang dimaksud adalah kemanfaatan barang barang itu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Maksudnya barang barang tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan syarak. Contohnya, jika barang yang dibeli saat terjadi transaksi mempunyai tujuan yang bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh ketetapan syarak, maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.

(3) Milik pribadi orang yang melakukan akad.

Maksudnya yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau jika bukan milik pribadi maka barang tersebut harus telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, tidak sah untuk menjual barang orang lain yang belum mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut atau barang tersebut baru akan menjadi miliknya. Misalnya, seorang anak yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli, anak tersebut menjual barang yang masih menjadi milik orangtuanya tanpa ada izin dari pemilik sah barang tersebut yang mana itu adalah orangtuanya. Perbuatan anak itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut dikatakan batal.

(4) Dapat diserahkan

Maksud dapat diserahkan di sini adalah penjual sebagai pemilik sah barang atau sebagai orang yang diberi kuasa atas barang tersebut dapat menyerahkan barang yang akan menjadi objek dalam perjanjian jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang memang sudah disepakati saat penyerahan barang tersebut.

Ketentuan itu dapat disandarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Ibn Mas'ud *ra* bahwasannya Rasulullah *saw* telah bersabda: Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan”.

Dari Hadis di atas yang dimaksudkan adalah barang yang dijual itu harus nampak, nyata, dan dapat diketahui nominal atau jumlah dari barangnya. Jadi barang yang sudah tidak ada lagi atau barang yang sulit untuk didapatkan kembali seperti barang tersebut digadaikan itu tidak sah.

(5) Mengetahui

Maksudnya adalah barang yang menjadi objek di dalam perjanjian jual beli harus diketahui beratnya, jumlahnya, takaran, dan ukuran lainnya, karena jika timbul keraguan dari salah satu pihak maka jual beli tersebut tidaklah sah.

(6) Barangnya ada di tangan atau dikuasai.

Jadi sesuatu barang yang belum berada di tangan atau tidak berada dalam kuasa penjual itu tidak diperbolehkan, karena bisa jadi barang

tersebut cacat dan tidak bisa diserahkan sebagaimana dengan perjanjian di awal.

d. Macam-Macam Jual beli

Jual beli dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) macam jual beli, yaitu: jual beli *murâbahah*, jual beli *salam*, dan jual beli *istiṣnâ'*. Adapun penjelasan dari ketiga macam jual beli tersebut sebagai berikut:

1) Jual Beli *Murâbahah*

Murâbahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. *Bai' al-Murâbahah* adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.¹

Murâbahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, *murâbahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga

¹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, 2015, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12, No. 2, h. 787.

jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.¹

Adapun syarat jual beli *murâbaḥah*:

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Secara prinsip, jika syarat dalam (a) (b) atau (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 - (1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - (2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
 - (3) Membatalkan kontrak.²

Jual beli *al-Murâbaḥah* di atas hanya untuk produk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak, bila produk tersebut tidak memiliki penjual maka sistem yang digunakan adalah *murâbaḥah* kepada pemesan pembelian (*murâbaḥah* KPP). Dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang-

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Deep Publish, 2018), h. 279.

² M. Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 117.

barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesan.¹

2) Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran tunai akan tetapi barang yang menjadi objek jual beli itu sendiri di tangguhkan.

Menurut Sayyid Sabiq, *salam* disebut juga *salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.²

Di dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum jual beli *salam* Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang (bermuamalat tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S al-Baqarah (2): 282).

3) Jual Beli *Istiṣnâ*’

Jual beli *istiṣnâ*’ adalah jual beli dengan sistem pesanan yang mana artinya meminta orang lain yang berbakat di bidangnya membuatkan sesuatu untuknya.

Dasar hukum jual beli *istiṣnâ*’ ada di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

¹ *Ibid.*

² *Ibid*, h. 118.

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibn ‘Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi jual beli *salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah *swt* pada kitabnya dan di izinkannya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.¹

e. Jual Beli yang Dilarang.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, maka dituliskan di dalam buku Rachmat Syafe’i yang berjudul *Fiqh Muamalah*, Wahbah al-Zuhali meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab *Ahliyyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang *bâligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertaṣarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah berikut ini:²

a) Jual beli orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau

¹ Sudarto, h. 285.

² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*..., h. 93.

sepele. Menurut ulama Syâfi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *bâligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyyah*.

Adapun menurut ulama Mâlikiyyah, Hanafiyyah, dan Hanâbilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah *swt* dalam surat al-Nisâ' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَاسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (Q.S al-Nisâ' (4): 6).

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut mayoritas ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syâfi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyyah, hukum jual-beli orang terpaksa seperti jual beli *fudûl* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauqûf*).

Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang, terpaksa). Menurut ulama Mâlikiyyah, tidak lazim, baginya ada *khiyâr*. Adapun menurut ulama Syâfi'iyah dan Ḥanâbilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e) Jual beli *fuḍûl*

Jual beli *fuḍûl* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Ḥanafiiyyah dan Mâlikiyyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanâbilah dan Syâfi'iyah, jual beli *fuḍûl* tidak sah.

f) Jual beli orang yang terlarang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Mâlikiyyah, Hanafiiyyah dan pendapat paling *ṣahîḥ* di kalangan Ḥanâbilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syâfi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Mâlikiyyah dan Ḥanafiiyyah, sedangkan menurut ulama Syâfi'iyah dan Ḥanâbilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut mayoritas selain Mâlikiyyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati

hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Mâlikiyyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fâsid* menurut ulama Ḥanafiiyyah dan batal menurut ulama Ḥanâbilah.

2) Terlarang Sebab *Ṣîghah*.

Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan kabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

a) Jual beli *mu'âṭah*

Jual beli *mu'âṭah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memekai ijab dan kabul. Mayoritas ulama menyatakan *ṣaḥîḥ* apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab dan kabul dengan isyarat, perbuatan,

atau cara cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *ṣighâh* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan akad jual beli, yang menjadi prinsip dasar jual beli adalah ungkapan (*lafaz*) dan makna makna yang ada di dalam jiwa akad yang tidak berwujud kecuali dengan ungkapan yang mengukuhkan apa yang ada di dalam hati. Karena prinsip dasar dalam akad adalah ada saling meridhai, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisâ' ayat 29, yang telah dibahas dalam dalil hukum jual beli di atas. Berdasarkan prinsip ini, menurut ulama Zâhiriyyah tidak sah praktik akad jual beli *mu'âṭah*.¹

Dalam mengomentari kedudukan jual beli *mu'âṭah*, Ibnu Suraij mengemukakan sebuah kaidah yang dikutip di dalam buku Enang Hidayat yang berjudul Fiqih Jual Beli sebagai berikut: "Setiap jual beli yang diakui oleh adat (kebiasaan) bisa dilakukan dengan cara *mu'âṭah* dan masyarakat memandang bahwa hal itu termasuk jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli yang tidak diakui adat (kebiasaan) edengan cara

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015), h. 23.

mu'âṭah seperti jual beli binatang dan arak, maka tidak termasuk jual beli.¹

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati *keṣaḥîḥan* ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *'âqid* pertama kepada *'âqid* kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c) Jual beli isyarat atau tulisan

Disepakati *keṣaḥîḥan* akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *'âqid*. Apabila isyarat tidak dapat diapahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqâd* (terjadinya akad).²

e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Tetapi, akan lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Ḥanafiyah

¹ *Ibid.*

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., h. 96.

membolehkannya, sedangkan ulama Syâfi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fâsid* menurut ulama Ḥanafiyah, dan batal menurut mayoritas ulama.

g) Jual beli *najasyî*

Contoh dari *najasyî* apabila seseorang (A) sedang melakukan tawar menawar harga barang dengan penjual (B), lalu datang (C) kepada penjual (B) dan berkata: “saya bisa beri harga yang lebih tinggi daripada tawaran sebelumnya”. Jual beli ini dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan keterpaksaan atau bukan kehendak sendiri. Hal ini sesuai dengan hadits Rasûlullah *saw*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ النَّجْشِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹

“Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Mâlik dari Nâfi’ bin ‘Umar *ra.* berkata bahwa “Rasûlullah *saw*, telah melarang jual beli *najasyî*.” (H.R. Bukhari).

¹ Muhammad bin ‘Isma’îl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, No. 2142,, h. 69.

3) Terlarang Sebab *Ma'qûd 'Alaih* (Objek Jual Beli)

a) Jual beli *Garar*

Garar secara harfiah adalah resiko, sementara dalam istilah bisnis adalah menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan, atau dalam kata lain, bahwa dalam setiap transaksi, akibat keabaian atau lalai dalam menetapkan point-point perjanjian penting yang berhubungan dengan pertimbangan atau ukuran objek, para pihak penanggung resiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada mereka.¹ Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).²

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah *saw*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ ابْنُ

مَاجَةَ)

“Dari Abu Hurairah. Ia berkata : Rasulullah *saw* melarang jual beli dengan lemparan batu dan larang jual beli *garar*. (H.R. Ibnu Mâjah).³

¹ Abdul Qodir Zaelani, 2009, “Bunga Bank dalam Perspektif Sisio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)” *Jurnal Asas*, Vol. 4, No. 2, h. 8.

² Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi*..., h. 102.

³ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, No. 2194..., h., 739.

Para ulama membagi *garar* kepada tiga macam berikut ini:

- (1) *Al-Garar al-Yasîr*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.
- (2) *Al-Garar al-Kaşîr/al-Fâhîsyah*, yaitu ketidaktahuannya yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal.
- (3) *Al-Garar al-Mutawassîf* yaitu *garar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-garar al-yasîr* atau *al-garar al-kaşîr/al-fâhîsyah* dan berada di atas *al-garar al-yasîr*. Contohnya: jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli barang hasil *gaşab*, jual beli buah sebelum tanpa baik tidaknya buah tersebut, dan yang lainnya.¹

b) Jual beli buah-buahan sebelum tampak baiknya

Hukum Islam telah melarang jual beli seperti ini, dikarenakan jual beli buah-buahan yang belum tampak baiknya merupakan salah satu dari beberapa macam jual beli yang diharamkan karena *garar*.

¹ *Ibid*, h. 103.

Adapun dalil yang berhubungan dengan keharaman dari jual beli buah buahan yang belum tampak baiknya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرِ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas. Ia berkata: Rasulullah saw melarang menjual buah hingga nyata bisa dimakan, dan tidak boleh dijual bulu yang masih di badan (binatang) dan susu yang di dalam tetek.” (HR. Thabrani)

Di dalam buku Enang Hidayat Fiqih Jual Beli, al-Mawardi (sebagaimana dikutip ‘Ali bin ‘Abbas al-Hukmi) menyebutkan ciri-ciri buah tersebut sudah jelas baik atau manfaatnya (*budwi al-ṣalâh*) kepada hal hal sebagai berikut:

- (1) Buah itu warnanya baik seperti buah kurma, anggur.
- (2) Buah itu manis rasanya seperti buah tebu. Atau buah tersebut rasanya masam seperti delima.
- (3) Buah itu telah matang seperti buah tin dan semangka.
- (4) Buah itu sudah mengeras seperti buah gandum.
- (5) Buah itu sudah tinggi seperti makanan hewan (rumput) dan tanaman sayur-sayuran.
- (6) Buah itu sudah besar seperti buah mentimun.
- (7) Buah itu sudah pecah seperti kapas.

- (8) Buah tersebut sudah terbuka dan harum seperti bunga mawar.¹

Mayoritas ulama yang terdiri dari Mâlikiyyah, Syâfi'iyyah, dan Ḥanâbilah berpandangan bahwa menjual buah buahan sebelum tampak baiknya (belum masak) hukumnya batal, sedangkan menurut ulama Ḥanafiiyyah hukumnya *fâsid*.²

f. Etika dalam Jual Beli

Rasulullah *saw* telah menganjurkan untuk melakukan perniagaan, berdagang atau jual beli, Rasulullah *saw* bersabda dalam sebuah Hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ Rasulullah *saw* pernah ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah *saw* menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik.³

Salah satu dari beberapa bagian penting jual beli dalam Islam adalah etika berbisnis atau etika berjual beli. Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang

¹ *Ibid*, h. 113.

² *Ibid*.

³ Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, h. 798.

mengatur hidup manusia).¹ Etika sendiri di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).² Dengan demikian, definisi moral dan etika itu berbeda. Norma merupakan suatu nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika merupakan cerminan kritis dan penjelasan rasional mengapa suatu itu baik dan buruk.

Di Indonesia sendiri pun permasalahan etika bisnis ini banyak yang mengabaikannya baik itu dari pebisnis menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Para pebisnis yang banyak mengabaikan etika dalam berbisnis karena hal tersebut dapat mempersempit ruang gerak mereka dalam mencari keuntungan ekonomis. Padahal, mencari keuntungan sebesar-besarnya merupakan salah satu prinsip dari ekonomi.

Sistem ekonomi Islam sendiri berangkat dari kesadaran etika, sedangkan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak terlalu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Ekonomi kapitalis berangkat dari kepentingan diri sendiri sedangkan sosialis dari kepentingan kolektif.

Islam sendiri telah memperingatkan tentang tata cara berbisnis yang baik atau beretika, salah satunya pada

¹ Veithzal Rivai, et. al. *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) h. 32.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*..., h. 357.

firman Allah *swt* dalam surat al-Nisâ' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al-Nisâ' (4): 29).

Bagi kita orang awam yang tidak terlalu mengerti tafsir Alquran sendiri pun sudah bisa memaknai apa maksud dari kata batil dalam surat al-Nisâ' ayat 29 tersebut di atas. Di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri kata batil berarti sia-sia atau tidak benar, dari sini kita bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya Allah *swt* melarang kita untuk melakukan bisnis dengan cara yang tidak benar yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam.

Rasulullah *saw* sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis berikut ini adalah uraiannya.¹

Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah *saw* sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah *saw* sendiri bersikap

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Business*, h. 86.

jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

Kedua, kesadaran tentang arti sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'âwun* (menolong orang lain) sebagaimana implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung materiil semata, tetapi disadari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu, Nabi Muhammad *saw* sangat *intens* melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

Keempat, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹

“Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik dari Nafi’ bin ‘Umar *ra.* berkata bahwa “Rasulullah *saw*, telah melarang jual beli *najasyi*.” (H.R. Bukhari).

Keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

Ketujuh, tidak melakukan *ihtikâr*. *Ihtikâr* ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).

Kedelapan, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar benar diutamakan. Firman Allah *swt* dalam surat Al-Muṭaffifîn ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّالِسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالَوْهُمْ أَوْ وُزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“1, Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (Q.S al-Muṭaffifîn (83): 1-3).

¹ Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, No. 2142,, h. 69.

Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah *swt*. Firman Allah *swt* dalam al-Nûr ayat 37 yang berbunyi:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا بَصَرَ ﴿٣٧﴾

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang” (Q.S al-Nûr (24): 37).

Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Kesepuluh, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya (*maḍarrât*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena diduga keras, karena dapat mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

Kesebelas, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.

Kedua belas, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan firman Allah *swt*. Dalam surat al-Nisâ' ayat 29.

Ketiga belas, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah *saw* memuji seseorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya.

Keempat belas, memberi tanggang waktu apabila penghutang (kreditur) belum mampu membayar.

Kelima belas, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah *swt* dalam surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S al-Baqarah (2): 278).

Jika menelusuri sejarah dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad *saw* adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Alquran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi

tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Dengan demikian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah *swt* Sebagai orang yang kesetanan, sebagaimana firman Allah *swt*. Dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ... ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...” (Q.S al-Baqarah (2): 275).¹

Sebagai makhluk sosial yang telah diciptakan Allah *swt*. Untuk hidup bermasyarakat yang awal mula diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya bisa saling terhubung dan mengenal di antara mereka. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat, Allah *swt* memberi kita naluri untuk saling tolong menolong. Di dalam buku Enang Hidayat yang berjudul Fiqih Jual Beli, beliau mengutip perkataan Abdul Sami’ Ahmad Imam, Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal

¹ *Ibid.*

tersebut, Allah *swt* mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.¹

Memberikan kelonggaran kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan tujuan dari pensyariatan jual beli itu sendiri. Karena apa-apa yang ada di tangan sesamanya itu terhubung dalam hal kebutuhan manusia itu sendiri.

Salah satu syariat Islam demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Dengan demikian seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Maka dari pada itu akan terdapat hikmah dan rahmat Allah *swt* dalam melakukan pensyariatan jual beli itu. Sebagaimana firmanNya berikut ini:

أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S Al-Mâ'idah (5): 50).²

¹ Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi...*, h. 15.

² Mushaf Ash-Shahib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 116.

B. Kajian Teori

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Nurul Fadhilah dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparatif Empat Mazhab)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dengan kesimpulan analisa bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk kategori riba *fadl* yaitu pertukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah atau nilai yang berbeda.
2. Ria Yurisca Suhada dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dan dengan kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli dalam satu transaksi.

3. Yuyun Anggraini dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syari’ah Cabang Cakranegara Mataram”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan dengan hasil analisis bahwa praktik tersebut lebih mengedepankan prinsip sosial dibanding prinsip fikih. Dan dalam hal tersebut terdapat dua pendapat, yang pertama tidak diperbolehkan dikarenakan dapat menyebabkan riba dan pendapat kedua diperbolehkan selama emas diperlakukan sebagai barang (*sil’ah*).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjha Mada University, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CP Pustaka Setia 2012.
- Bin Majah, Muhammad Bin Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hanan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Kartika, Elisa, dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah*, 2013.
- Marbun, *Membuat Perjajian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Suara, 2009.

- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konstatual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta C.V, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suparyanto, Yudi, *Hukum Perdata*, Klaten: Cempaka Putih, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Syarifudin , Amir, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 2001.

Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Sumber Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015).

Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Juni 2015).

Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Tajuddin, pemilik toko emas Bahagia I desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Lili, pemilik toko emas Bahagia II desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Hapipi, pemilik toko emas Harapan Murni desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Sabar, pemilik toko emas Barokah desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Mursinah, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Srinatun, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Yuli, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Shinta, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Maskuroh, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Sumiatun, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Fajriah, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Sukinem, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Tini, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan ibu Lela, desa Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal 16 Januari 2020.